



GLOBALISASI SEBAGAI KATALIS KOSMOPOLITANISME DAN MULTIKULTURALISME: STUDI KASUS RESISTANCE CINA TERHADAP KOSMOPOLITANISME

Hardi Alunaza SD¹, Moh. Sarifudin²

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Tanjungpura Pontianak,
e-mail: hardialunaza@gmail.com

²Program Hubungan Internasional, Universitas Airlangga Surabaya
e-mail: moh.sarifudin-2015@fisip.unair.ac.id

Abstract

This research is attempted to answer and explain on how the similarities and the differences between cosmopolitan and multiculturalism in case of China's resistance towards the cosmopolitan phenomenon. This is a descriptive research with qualitative approach. The data collection method in this research is through library with secondary data sources by using the concept of Cosmopolitanism and Multiculturalism. Analysis is conducted by referring Globalization as a pattern that creates an increasingly obvious dependence relationship with the loss of state boundaries in the process of economic, political, and cultural integration. Globalization has also given chance to Cosmopolitanism and Multiculturalism that is currently growing rapidly around the world. The results shows and explains that globalization is functioned as catalyst between Cosmopolitanism and Multiculturalism. In China's case it could be said that the cosmopolitanism is in two ways: the market cosmopolitanism and the international-federation cosmopolitanism.

Keywords: catalyst, cosmopolitanism, globalization, multiculturalism

Abstrak

Penelitian ini disajikan guna menjawab dan menjelaskan bagaimana persamaan dan perbedaan antara kosmopolitan dan multikulturalisme dengan studi kasus dalam *resistance* Cina terhadap fenomena kosmopolitanisme. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam riset ini adalah melalui studi pustaka dengan sumber data sekunder dengan menggunakan konsep Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme. Analisis dilakukan dengan merujuk Globalisasi sebagai suatu pola yang menciptakan hubungan ketergantungan yang semakin jelas dengan hilangnya batas Negara dalam proses integrasi ekonomi, politik, dan juga budaya. Globalisasi juga telah melahirkan kosmopolitan dan multikulturalisme yang saat ini sedang berkembang pesat di belahan dunia. Hasil analisis menunjukkan dan menjelaskan bahwa Globalisasi fungsional sebagai katalis antara Kosmopolitanisme dengan Multikulturalisme. Pada kasus Cina dapat dikatakan kosmopolitanisme dalam dua hal yakni kosmopolitanisme pasar dan kosmopolitanisme federasi internasional.

Kata Kunci: globalisasi, katalis, kosmopolitanisme, multikulturalisme

Pendahuluan

Globalisasi merupakan pemicu berkembangnya isu kosmopolitanisme dan multikulturalisme, karena globalisasi merupakan sebuah proses yang mengaburkan batas negara, mengintegrasikan ekonomi, budaya, teknologi, dan pemerintahan, sehingga menciptakan hubungan ketergantungan yang semakin kompleks. Selain itu, Globalisasi telah berhasil memperluas jangkauan dan mempercepat aliran modal, barang, orang, dan gagasan yang melintasi batas-batas negara-bangsa (Noris, 2000: 155). Sifat kebergantungan dan kemudahan akses yang disediakan oleh Globalisasi membuat kosmopolitanisme dan multikulturalisme berkembang di berbagai negara. Perkembangan yang terjadi tidak diiringi oleh pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai kedua perihal tersebut. Oleh karena itu, banyak masyarakat sering keliru dalam menggunakan istilah kosmopolitanisme dan multikulturalisme. Terutama istilah kosmopolitanisme yang lebih sering digunakan untuk menyebutkan kondisi kota atau negara yang multikultural (Kariadi, 2017: 23)

Kesalahan dalam memahami kosmopolitanisme dan multikulturalisme lebih sering dikarenakan keduanya memiliki persamaan dalam hal menghargai keberagaman hidup karena perbedaan. Sementara itu, Kosnick mengemukakan bahwa kosmopolitanisme dan multikulturalisme sering memperlihatkan hal-hal yang serupa misalnya mengenai keterbukaan terhadap tradisi budaya dan tradisi asing yang berbeda. Disamping itu, juga memiliki keinginan dan kemampuan untuk terlibat tradisi budaya dan orientasi asing yang berbeda dengan kebudayaan asli mereka (Horvarth, 2010:89). Walaupun memperlihatkan hal yang sama, kosmopolitanisme dan multikulturalisme pada dasarnya merupakan hal yang berbeda.

Di era Globalisasi saat ini, perbedaan antara keduanya semakin kabur yang pada awalnya perbedaan tersebut dapat dilihat dari batas negara. Maksudnya adalah multikulturalisme masih memiliki batas teritorial, namun batas teritorial tersebut semakin kabur. Selain itu, lahirnya bentuk-bentuk baru dari kosmopolitanisme juga membuat perbedaan tersebut semakin terlihat abu-abu. Sehingga dalam melihat perbedaan antara keduanya perlu pengkajian lebih dalam. Hal inilah yang kemudian akan dibahas dalam tulisan ini, bagaimana perbedaan antara kosmopolitanisme dan

multikulturalisme dengan studi kasus yakni *resistance* Cina terhadap kosmopolitan di era globalisasi.

Kosmopolitanisme

Kosmopolitanisme secara epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Kosmos* dan *Politês*, *Kosmos* sendiri memiliki arti “alam semesta” atau “dunia” sementara *Politês* memiliki arti “warga negara”. Secara sederhana kosmopolitan dapat diartikan sebagai warga negara dunia. Hal senada juga tertuang dalam catatan kehidupan Diogenes, yang ketika ditanya “Dari mana asalmu?”, Dia menjawab “Saya seorang warga negara dunia (*kosmopolitês*)” (Diogenes, 1925: 71). Secara umum kosmopolitanisme dapat diartikan sebagai gagasan untuk membangkitkan kewarganegaraan dunia dan mempromosikan identitas yang tidak berdasarkan teritorial (Breckenridge, 2002:2). Perkembangan globalisasi yang begitu cepat membuat kosmopolitanisme tidak lagi dapat dianalisis hanya melalui sebuah definisi general saja. Karena globalisasi membuat hubungan negara menjadi kompleks, maka dalam Cina kosmopolitanisme harus lebih fokus dan salah satu caranya adalah Cina kosmopolitanisme melalui bentuk-bentuknya.

Paulina, Vertoc dan Cohen merupakan beberapa orang yang memberikan gambaran kecil mengenai bentuk kosmopolitanisme. Menurut mereka sampai pada saat ini belum ada gambaran yang menyeluruh terkait kosmopolitanisme. Pauline menyebutkan enam bentuk dari kosmopolitanisme yaitu: kosmopolitanisme moral, kosmopolitanisme romantis, kosmopolitanisme hukum, kosmopolitanisme budaya, kosmopolitanisme pasar dan kosmopolitanisme internasional federatif (Pauline.1999:505-506).

Selanjutnya Vertoc dan Cohen juga membagi kosmopolitanisme kedalam bentuk-bentuk kecil seperti, kosmopolitanisme sosial budaya, kosmopolitanisme filsafat, kosmopolitanisme politik, kosmopolitanisme sikap dan kosmopolitanisme kompetensi (Pichler, 2009:706). Bentuk-bentuk dari kosmopolitanisme ini pada akhirnya akan membantu Cina kosmopolitanisme yang ada di suatu negara. Karena ketika kita menganalisis kosmopolitanisme secara umum, maka tidak ada negara yang sepenuhnya kosmopolit dan begitu pula sebaliknya tidak ada negara yang sepenuhnya tidak kosmopolit.

Selain itu perlu diketahui bahwa bentuk-bentuk kosmopolitanisme yang ada tetap memberikan ruang bagi identitas yang merupakan salah satu pemeran utama yang sekaligus membedakan kosmopolitanisme dan multikulturalisme. Identitas memiliki berbagai definisi salah satunya identitas digambarkan sebagai cara mendefinisikan individu dan kelompok berdasarkan ras, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Selain itu, identitas didefinisikan sebagai konsep mengenai siapa mereka, apa jenis mereka, dan bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain (Fearon, 1999:04).

Menurut Castell terdapat tiga cara dalam membangun sebuah identitas, yaitu: *legitimising identity*, *resistance based identity*, dan *project based identity*. Pertama, *legitimising identity* merupakan sebuah identitas yang dibangun oleh institusi pada umumnya dan negara pada khususnya. Salah satu contohnya adalah negara Inggris. Inggris membangun identitas yang kuat tanpa menggambarkan komponen-komponen tradisional, melainkan membangunnya berdasarkan negara, konstitusi, serta elemen multikultural dan etnis. Kedua, *resistance based identity* adalah identitas yang berbasis perlawanan. Dalam hal ini kelompok-kelompok yang terpinggirkan mulai membangun sebuah identitas yang menolak asimilasi. Contohnya adalah gerakan yang dilakukan oleh kelompok India di seluruh bagian Amerika Latin. Ketiga, *project based identity* adalah identitas yang didasarkan pada identifikasi diri, meskipun menggambarkan komponen budaya, sejarah dan geografis. Salah satu contohnya adalah gerakan feminisme (Castells, 2006:07-09).

Pemahaman akan definisi, bentuk dan pemeran utama dalam kosmopolitanisme belum dapat menggambarkan kosmopolitanisme. Dibutuhkan contoh yang jelas untuk menggambarannya. Salah satu contoh dari kosmopolitanisme adalah keterlibatan negara dalam *United Nations* atau Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). PBB merupakan salah satu *global governance* yang beranggotakan 192 negara pada tahun 2008. Setiap negara tidak paksakan untuk menjadi negara demokratis agar dapat menjadi bagian dari PBB. Artinya, mereka berhak untuk membawa identitas mereka masing-masing. Selain itu, mereka juga tidak mengalami diskriminasi karena pada *The General Assembly* atau Majelis Umum (MU) semua negara sama, baik negara kaya atau miskin maupun negara besar atau kecil, memiliki satu suara (United Nations, 2008:03). Keterlibatan mereka dalam PBB juga dikarenakan semua negara beranggapan bahwa mereka merupakan

bagian dari masyarakat dunia yang bertugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia.

Analisis mengenai PBB yang menggunakan bentuk-bentuk kosmopolitanisme dapat dikatakan sebagai analisis mengenai PBB berdasarkan kosmopolitanisme internasional federasi yang dikemukakan oleh Pauline. Kosmopolitanisme terdiri dari yang lemah dan yang kuat. Kosmopolitanisme yang lemah dan yang kuat mengacu pada tingkat kohesi internal federasi negara. Kosmopolitanisme yang lemah menganjurkan pembentukan liga negara tanpa kekuasaan koersif. Kosmopolitanisme yang kuat mendukung pembentukan liga dengan kewenangan untuk menegakkan hukum federal atau Republik berdasarkan romantisme ideal tanpa paksaan (Pauline, 1999:510). Pendefinisian yang di kemukakan oleh Pauline cukup memperlihatkan bahwa PBB merupakan salah satu bentuk kosmopolitanisme karena sifat kebergantungan antarnegara yang semakin erat akibat Globalisasi. Selain itu, PBB juga memiliki kemampuan untuk memberikan atau menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang melanggar kesepakatan PBB. Sehingga dapat dikatakan bahwa PBB mampu mewadahi Kosmopolitanisme yang lemah maupun yang kuat.

Multikulturalisme

Multikulturalisme diidentifikasi kedalam tiga konsep yakni demografi, ideologi dan kebijakan. Pada tingkat demografis, masyarakat multikultural diwakili oleh kelompok-kelompok etnis budaya yang berbeda dan hidup bersama dalam satu wilayah. Pada tingkat ideologis, multikulturalisme dikonseptualisasikan dalam etos politik dan agama. Sedangkan yang termasuk pada tingkat kebijakan adalah multikulturalisme berdasarkan toleransi, saling menghormati, serta untuk mempertahankan budaya warisan mereka secara normatif (Liu, 2013:658).

Multikulturalisme mengalami perkembangan pesat di beberapa negara sebagai akibat dari globalisasi, migrasi pekerja, reunifikasi keluarga dan pencari suaka perlindungan politik, bencana alam, atau krisis ekonomi (Ng & Bloemraad, 2015: 620). Salah satu negara yang multikultural baik secara demografis, ideologi maupun secara kebijakan adalah Kanada.

Multikulturalisme memiliki beberapa bentuk yang sering terjadi di banyak negara. Menurut Ng & Bloemraad (2015: 61), bentuk-bentuk tersebut adalah asimilasi

(imigran atau etnis minoritas mengambil budaya dari kelompok dominan), pemisahan (kelompok minoritas menolak untuk mengadopsi budaya kelompok dominan), terpinggirkan (kelompok dominan menolak budaya anggota kelompok minoritas), serta integrasi atau pluralisme (anggota kelompok dominan dan kelompok minoritas mengadopsi dan beradaptasi dengan budaya masing-masing). Bentuk-bentuk dari multikulturalisme ini sangat rentan terhadap konflik karena dalam multikulturalisme yang menjadi aktor dominan adalah masyarakat. Ketika sebagian besar masyarakat atau penduduk asli mau menerima multikulturalisme, maka multikulturalisme akan baik dan begitu pula sebaliknya. Salah satu contoh negara yang demikian itu adalah Kanada.

Kanada merupakan negara pertama yang mengimplementasikan multikulturalisme kedalam kebijakan negaranya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada, Pierre Trudeau, bahwa meskipun Kanada memiliki dua bahasa resmi, tidak ada budaya resmi, juga tidak ada kelompok etnis yang diutamakan dari kelompok etnis yang lainnya. Pernyataan Trudeau ini berdampak terhadap perubahan domestik dan luar negeri Kanada. Pemerintah Kanada mulai membuat peraturan mengenai masalah diskriminasi dan kesetaraan serta memberikan keleluasaan bagi para imigran untuk masuk ke Kanada. Kebijakan pemerintah ini menuai protes dari penduduk Kanada asal Perancis dan penduduk asli Kanada. Alasan protes mereka adalah kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan menghambat Quebec menjadi lebih mandiri. Pada tahun 1990-an, penolakan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas di Kanada terus berlanjut. Penolakan tidak lagi hanya sebatas permasalahan multikulturalisme saja tetapi juga lebih spesifik yakni berkaitan dengan warga negara, identitas nasional, imigrasi dan lain sebagainya. Akibat dari protes ini adalah banyak program yang dibuat oleh pemerintah Kanada untuk imigran tidak dilaksanakan (Winter, 2015: 642-649).

Hubungan Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme

Perbedaan Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme dapat dilihat dari tiga hal yakni definisi, bentuk dan aktor utamanya. Namun, dibalik perbedaan tersebut terdapat keterkaitan antara keduanya. Keterkaitan yang ada tidak lepas dari pemahaman dasar atas keduanya yakni menghargai dan mampu hidup dalam perbedaan. Multikulturalisme dapat dikatakan sebagai sarana dalam membentuk identitas. Ketika multikulturalisme

dihadapkan pada sebuah permasalahan, maka hal pertama yang muncul adalah identitas. Identitas merupakan salah satu komponen penting dari Kosmopolitanisme. Contohnya adalah yang terjadi di Amerika Serikat. Imigran yang berasal dari Amerika Latin melakukan perlawanan terhadap proses asimilasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Imigran dari Amerika Latin beranggapan bahwa proses asimilasi akan merujuk kepada identitas tunggal yang secara tidak langsung akan menghilangkan identitas mereka.

Perlawanan ini muncul karena para imigran yang berasal dari Amerika Latin merasa kebingungan. Secara fisik identitas mereka terlihat seperti Amerika Latin sedangkan secara psikis identitas mereka merujuk kepada Amerika Serikat. Sehingga, ketika para imigran kembali ke negara asal mereka, banyak pemikiran mereka yang tidak sesuai dengan lingkungan disekitar mereka. Sementara itu, ketika mereka berada di Amerika Serikat, mereka merasa bukan bagian dari Amerika Serikat.

Kondisi inilah yang kemudian dikatakan oleh Moreiras (2004) sebagai *Imigrant Imaginary*. Secara interpretif artinya adalah perasaan terjebak antara bangsa dengan negara, gelisah, disertai potensi yang luar biasa sehingga memunculkan banyak pertanyaan dalam dirinya. Kondisi ini muncul dikarenakan banyak faktor, yang salah satunya adalah pendidikan. Melalui pendidikan Amerika Serikat berusaha membentuk pemikiran para imigran sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini yang kemudian dikatakan bahwa, ketika negara mulai melakukan perlawanan terhadap multikulturalisme, maka tanpa disadari mereka juga melakukan perlawanan terhadap kosmopolitanisme.

Sikap dari kelompok-kelompok minoritas ini merupakan perlawanan terhadap bentuk-bentuk dari multikulturalisme. Hal ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi terdapat juga dalam gerakan kelompok India di Amerika Latin. Bentuk-bentuk ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Castell (2006) bahwa salah satu cara untuk membangun sebuah identitas adalah dengan melakukan perlawanan. Keterkaitan antara keduanya tidak lepas dari cakupan identitas itu sendiri, di mana unsur-unsur yang terdapat dalam multikulturalisme merupakan bagian dari identitas kosmopolitanisme. Sehingga, bisa dikatakan bahwa ketika identitas ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap multikulturalisme, maka bisa diasumsikan bahwa masyarakat masih belum siap menjadi masyarakat kosmopolitan yang merasa bagian dari warga dunia dan mampu hidup secara berdampingan.

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa Globalisasi merupakan katalis antara kosmopolitanisme dan multikulturalisme. Globalisasi mampu menciptakan multikulturalisme demografis yang begitu cepat di berbagai negara. Secara tidak langsung menjadikan hal tersebut sebagai sebuah tabung-tabung percobaan. Ketika terjadi keterpinggiran dalam tabung (negara) tersebut, maka bisa dikatakan masyarakat yang berada dalam tabung tersebut belum siap untuk menuju ke tahap selanjutnya. Puncaknya adalah menjadi masyarakat yang kosmopolitan. Negara yang melakukan penolakan terhadap multikulturalisme dan kosmopolitanisme adalah Cina dengan menjalankan *The Great Firewall*.

***The Great Firewall* dan Kosmopolitanisme**

The Great Firewall atau lebih singkatnya yaitu *Great Firewall* (GFW) dan kebijakan minoritas Cina merupakan bentuk perlawanan Cina terhadap kosmopolitanisme dan multikulturalisme. GFW merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Cina pada tahun 1999. Kebijakan GFW dioperasikan oleh *National Computer Network Emergency Response Technical Team / Coordination Center of China* (CNCERT/CCC) yang dikontrol oleh *Ministry of Industry and Information Technology* (Daniel, 2016).

GFW berfokus pada keamanan dunia maya dengan cara mengontrol dan menyensor berbagai fitur yang ada di dunia maya. Karena fungsi utama GFW ialah memblokir, mengatur TCP, memblokir Proxy, menyensor dan memblokir *e-mail*. Selain itu, GFW ini juga telah memblokir seluruh layanan situs *Google, Facebook, Twitter, Youtube*, mesin pencari *Chrome*, aplikasi *smartphone* berbasis *android* dan lain sebagainya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa GFW membuat kebebasan seseorang dibatasi oleh pemerintah Cina baik dalam berinteraksi maupun mengikuti informasi. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Cina karena ketika seseorang diberikan kebebasan dalam berbicara dan bertukar gagasan, maka dapat menyebabkan kerusakan dan menghancurkan rezim (Bu, 2013: 1).

Dalam memperkuat GFW pemerintah Cina juga membuat undang-undang internet. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap pengguna internet di Cina wajib menggunakan kartu identitas asli untuk mendaftar ke penyedia jaringan internet. Undang-undang ini diterapkan agar penggunaan internet tidak disalahgunakan atau menyebar informasi yang tidak benar dan dilarang. Penerapan sistem pemerintahan

Cina menganut sistem komunis yang berperan utama dalam mengatur kebijakan politik keamanan dan sosial Cina. Pemerintah Cina tidak menginginkan warganya secara bebas memperoleh informasi melalui internet dengan cara memblokir beberapa mesin pencari yaitu *Google* dan segala situs yang terhubung dengan *Google*. Pemerintah Cina memilih bekerja sama dengan mesin pencari lokal bernama Baidu. Pemerintah Cina menggunakan Baidu untuk menguasai pasar pengguna internet di seluruh Cina. Upaya ini dilakukan untuk memperkenalkan sekaligus memopulerkan mesin pencari lokal (Yuzrizal, 2014: 5-10).

GFW dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap kosmopolitanisme dan multikulturalisme, karena membatasi seseorang untuk berinteraksi maupun mengintegrasikan dirinya kedalam tatanan dunia yang lebih luas melalui teknologi. Selain itu, GFW membuat seseorang hidup hanya dengan satu sudut pandang saja. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai dari kosmopolitanisme dan multikulturalisme yakni keterbukaan, keinginan dan kemampuan untuk terlibat dengan tradisi budaya yang berbeda dan orientasi asing yang berbeda dengan kebudayaan asli mereka (Horvarth, 2010: 89).

Pada dasarnya teknologi merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk membuka dirinya dan mulai berinteraksi dengan masyarakat lain. Perkembangan teknologi saat ini membuat wilayah tidak lagi hanya sebatas daratan, lautan maupun udara akan tetapi juga telah mencakup dunia maya. Bentuk perlawanan lain terhadap kosmopolitanisme dan multikulturalisme yang dilakukan oleh Cina adalah kebijakan minoritas.

Pembentukan Otoritas Cina pada tahun 1949, membuat pemerintah Cina mulai membuat kebijakan mengenai etnis minoritas. Kebijakan ini mengidentifikasi kelompok etnis yang berbeda-beda dengan melihat faktor sejarah, bahasa, budaya, adat, dan psikologis (Tim, 2010 :01). Selanjutnya pada tahun 1982, Pemerintah Cina memberikan hak kelompok minoritas melalui konstitusi. Kelompok minoritas diberikan kebebasan untuk mengembangkan dan bahasa mereka baik lisan maupun tulisan. Mereka juga berhak mempertahankan dan menjaga budaya mereka di "*regional autonomy*" (Leibold, 2013: 06). Perhatian Pemerintah Cina terhadap kelompok minoritas tidak mengalami perkembangan yang baik, justru mengalami penurunan di masa Pemerintahan Xi Jinping. Hal ini terlihat dari pidato Xi Jinping pada bulan Maret 2013 yang mengatakan

“Walking the Chinese road”, *“Cultivating the Chinese Spirit”*, serta *“Consolidating Chinese power”*. Pidato yang di kemukakan oleh Xi Jinping ini merupakan sikap Pemerintah Cina terhadap kelompok minoritas dan menyangkut permasalahan Tibet.

Selain itu, terdapat hukum yang dimaksudkan untuk menguntungkan minoritas melalui Undang-undang mengenai otonomi daerah. Salah satunya yakni, Pasal 15 dari MRNA yang memungkinkan untuk "perlindungan terhadap kelompok minoritas di bidang bahasa, pendidikan, representasi politik, administrasi, kebijakan ekonomi dan keuangan lokal, serta penggunaan sumber daya lokal dan alam". Namun, ketika dianggap kegiatan tersebut melawan gagasan tentang persatuan nasional maka pemerintah berhak untuk ikut campur (Buck,: 02). Kedua bentuk kebijakan inipun fungsional untuk melihat bentuk-bentuk kosmopolitanisme yang ada di Cina, sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Pauline (1999).

GFW membatasi masyarakat Cina dalam berinteraksi melalui dunia maya. Kebijakan minoritas pun membuat masyarakat Cina tidak mampu hidup berdampingan dengan masyarakat mayoritas di Cina. Kedua hal tersebut membuat kelompok minoritas di Cina terpaksa hidup di pelosok Cina agar dapat melestarikan budayanya. Kebijakan Pemerintah Cina ini tidak sesuai dengan konsep dari multikulturalisme yakni kebijakan. Dalam multikulturalisme kebijakan, dirujuk tingkat toleransi dan saling menghormati untuk mempertahankan budaya warisan mereka secara normatif (Liu, 2013: 658). Namun, hal ini tidak tercermin dari kebijakan Pemerintah Cina, sehingga dapat dikatakan bahwa Cina merupakan salah satu negara yang melakukan perlawanan terhadap kosmopolitanisme dan multikulturalisme tidak hanya pada ranah dunia maya (*cyber space*) melainkan juga di dunia nyata (*domestik*).

Pada sisi yang lain, ketika kebijakan GFW dan kebijakan mengenai kelompok minoritas dapat ditelaah menurut bentuk-bentuk kosmopolitanisme yang dijelaskan oleh Pauline. Hasilnya akan terlihat bahwa kebijakan GFW tidak mampu membendung kosmopolitanisme secara penuh. Berikut ini dikemukakan pendefinisian oleh Pauline (1999) mengenai bentuk-bentuk kosmopolitanisme. Pertama, Kosmopolitanisme Moral, yaitu pandangan bahwa semua manusia adalah anggota dari komunitas moral yang tunggal dan bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk semua manusia lain tanpa melihat kebangsaan, bahasa, agama, adat istiadat dan lain sebagainya. Dalam

definisi yang luas ini, kosmopolitanisme moral dapat mengambil bentuk yang berbeda, tergantung pada bagaimana seseorang memandang sifat moralitas.

Kedua, Kosmopolitanisme Hukum mengatur interaksi antara negara Cina dengan individu dari negara asing sejauh interaksi tersebut tidak atau belum diatur oleh perjanjian antarnegara yang sah. Inti dari hukum kosmopolitan (*Weltbürgerrecht*) adalah bahwa negara-negara dan individu memiliki hak untuk mencoba membangun hubungan dengan negara-negara lain dan warga negaranya. Ketiga, Kosmopolitanisme Budaya adalah pandangan bahwa manusia mengekspresikan dirinya dalam beragam bentuk budaya. Hal ini berarti pengakuan terhadap budaya yang berbeda dari kekhususan mereka. Selain itu, tidak mencoba untuk mencapai keseragaman budaya, karena akan menyebabkan pemiskinan budaya.

Keempat, Kosmopolitanisme Romantis adalah komponen-komponen penting dalam manusia seperti cinta, ikatan emosi, keindahan, iman bersama, serta saling percaya. Selain itu Kosmopolitanisme Romantis juga meliputi cita-cita individual, kebebasan, anti-otoritarianisme, serta kesetaraan. Kelima, Kosmopolitanisme Pasar adalah pandangan bahwa pasar harus menjadi ranah global tunggal perdagangan bebas. Hal ini, akan menjadi promosi perdamaian di seluruh dunia sekaligus meningkatkan kebebasan individu dan mengurangi peran negara.

Berdasarkan pendefinisian bentuk-bentuk kosmopolitanisme itu, secara spesifik GFW bisa dikatakan sebagai bentuk perlawanan Cina terhadap Kosmopolitanisme Moral, Kosmopolitanisme Romantis, Kosmopolitanisme Hukum, dan Kosmopolitanisme Budaya. Mengingat kebijakan Pemerintah Cina melalui GFW dan kebijakan terhadap kelompok minoritas itu tidak sesuai dengan definisi dari Pauline, maka GFW dan kebijakan terhadap kelompok minoritas merupakan bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Cina terhadap beberapa bentuk kosmopolitanisme.

Simpulan

Perbedaan antara Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu definisi, bentuk dan aktor. Namun, dibalik perbedaan tersebut terdapat keterkaitan antara Kosmopolitanisme dengan Multikulturalisme. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dengan jelas sebagai akibat dari Globalisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Globalisasi fungsional sebagai katalis antara Kosmopolitanisme dan

Multikulturalisme. Globalisasi mampu menciptakan Multikulturalisme Demografis yang begitu cepat di berbagai negara. Hal tersebut merupakan sebuah tabung percobaan, yang perkembangannya menunjukkan bahwa tidak semua negara mampu menerima keberagaman, salah satunya adalah negara Cina. Melalui GFW dan kebijakan minoritas Pemerintah Cina, maka Cina telah membatasi terjadinya dialog budaya yang merupakan cara untuk menumbuhkan kesadaran pada setiap individu akan nilai-nilai dari Kosmopolitanisme dan Multikulturalisme. Sehingga, dengan pembatasan tersebut masyarakat akan tumbuh dengan hanya asumsi tentang budaya lain, tanpa pernah mengetahui kebenarannya.

Daftar Pustaka

- Anderson, Daniel. (2016). *Splinternet Behind the Great Firewall of Cina Once Cina opened its door to the world, it could not close it again*, diakses melalui <http://queue.acm.org/detail.cfm?id=2405036>, (10 April 2016, 22.15WIB)
- Bu, Ruiwei. (2016). *The Great Firewall of Cina*, diakses 10/04/16 dari <http://campus.murraystate.edu/academic/faculty/wlyle/540/2013/Bu.pdf>
- Buck, Dina. (...). *Tibet Under Chinese Rule*, dalam Human Right and Human Welfare.
- Castells, Manuel. (2006). *Globalisation and Identity: A Comparative Perspective*. Transfer, 01, 2006.
- Fearon, James D.. (1999). What is Identity (As We Know Use The World)?, diakses melalui www.seminario2005.unal.edu.co/.../What%20is%... (30 April 2016, 21.08 WIB)
- Gannaway, Adam. (2009). *What Is Cosmopolitanism?*, dalam The New School for Social Research MPSA Conference Paper Panel 33-18: "Cosmopolitanism: For and Against".
- Horvarth, Christina. (2010). *The Cosmopolitan City*, dalam The Ashgate Research Companion to Cosmopolitanism.
- Kariadi, Dodik. (2017). *Menciptakan Generasi Berwawasan Global Berkarakter Lokal Melalui Harmonisasi Nilai Kosmopolitan dan Nasionalisme*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol I No. 2
- Leibold, James. (2013). *Ethnic Policy in Cina? Is Reform inevitable*, dalam Policy Studies.
- Moreiras, Alberto. (2004). *Global Fragments : A Second Latinamericansim* dalam Fredric Jameson dan M.Miyoshi, ed., *The Culture of Globalization*, Durham : Duke University Press.
- Ng, Eddy S. dan Irene Bloemraad. (2015). *A SWOT Analysis of Multiculturalism in Canada, Europe, Mauritius, and South Korea*, dalam American Behavioral Scientist 2015, Vol. 59(6) 619–636.

- Noris, Pippa. (2000). *Global Governance and Cosmopolitan Citizens*, dalam Joseph S. Nye and John D. Donahue, *Governance in a Globalizing World*, Washington: Brookings Institution Press.
- Pauline. (1999). *Six Varieties of Cosmopolitanism in Late Eighteenth-Century Germany*, dalam *Jurnal Journal of the History of Ideas*, Inc.
- Pichler, Florian. (2009). 'Down-to-Earth' Cosmopolitanism Subjective and Objective Measurements of Cosmopolitanism in Survey Research, dalam *Current Sociology* September 2009 Vol. 57(5): 704–732
- Tim, Yuen Siu. (2010). *Ethnic Minority Policy of People's Republic of Cina* dalam Research Project: Educational Provision for Ethnic Minority Students in Hong Kong: Meeting the Challenges of the Proposed Racial Discrimination Bill (HKIEd8001-PPR-2).
- United Nations. (2008). *Everything You Always Wanted to Know About the United Nations for Students at Intermediate and Secondary Levels*, New York: United Nations Publishing Section.
- Yuzrizal, Muhammad. (2004). *Dampak Implemetasi kebijakan The Great Firewall oleh Pemerintah Cina Terhadap Aktivitas Google INC Di Cina (2002-2006)*, diakses dari <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/2675/2607> (10 April 2016, 23.05WIB) Jom Fisip volume 1 No.2- Oktober 2014.